



# **LAPORAN MONEV**

## **PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI**

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**TRIWULAN KE-II TAHUN 2022**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jl. Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan II tahun 2022.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepada *Stakeholder* yang berkaitan dengan hasil monitoring yang ditemui pada Triwulan ke-dua agar segera ditindaklanjuti.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 26 Juli 2022  
Ketua,   
  
HERRY WIBAWA, S.H., M.H.  
NIP. 19570805 1982031006

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Manfaat .....	2
BAB II MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Pelaksanaan Monitoring di PTUN Serang .....	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring .....	3
C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik .....	3
1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat .....	4
2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta .....	5
3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala .....	6
4. Informasi Yang Dikecualikikan .....	10
BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	13
B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID .....	20
BAB IV PENUTUP .....	22
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah disampaikan.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

## **B. Tujuan**

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakatan terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## BAB II

### MONITORING PENGELoaAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### **A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring**

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

#### **C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik**

Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi bila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, diharapkan adanya teknologi informasi yang mudah diakses, dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan

prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <https://ptun-serang.go.id/>.

### 1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

<b>Informasi Yang Tersedia Setiap Saat</b>	<b>Link Tautan</b>
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT</li> </ul>	<a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html">https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register Perkara</li> <li>- Tahapan Penanganan Perkara</li> </ul>	<a href="https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara">https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Perkara</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2022">https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2022</a>
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai</li> <li>- Statistik penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>- Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin">https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Majelis Kehormatan Hakim</li> </ul>	
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua</li> </ul>	<a href="http://jdih.ptun-serang.go.id/">http://jdih.ptun-serang.go.id/</a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung</li> <li>- Hasil Penelitian yang dilakukan</li> </ul>	
<p>4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan</li> <li>- Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan</li> </ul>	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/">https://ppid.ptun-serang.go.id/</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Hakim dan Pegawai</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/posisi/hakim">https://ptun-serang.go.id/staffs/posisi/hakim</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Statistik Kepegawaian</li> </ul>	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian">https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian</a>

## 2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

Daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

<b>Informasi Yang Tersedia Setiap Saat</b>	<b>Link Tautan</b>
1. Pelaksanaan Cuti Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama hari Raya Idul Fitri 1443 H	<a href="https://ptun-serang.go.id/article/pelaksanaan-cuti-selama-periode-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-hari-raja-idul-fitri-1443-hijriyah">https://ptun-serang.go.id/article/pelaksanaan-cuti-selama-periode-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-hari-raja-idul-fitri-1443-hijriyah</a>
2. Surat Edaran Tentang Pelarangan Kegiatan uka Puasa Bersama pada Bulan Raadhan dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.	<a href="https://ptun-serang.go.id/article/surat-edaran-tentang-pelarangan-kegiatan-buka-puasa-bersama-pada-bulan-ramadhan-dan-kegiatan-open-house-halal-bihalal-pada-hari-raja-idul-fitri-1442-h-tahun-2021">https://ptun-serang.go.id/article/surat-edaran-tentang-pelarangan-kegiatan-buka-puasa-bersama-pada-bulan-ramadhan-dan-kegiatan-open-house-halal-bihalal-pada-hari-raja-idul-fitri-1442-h-tahun-2021</a>



PTUN Serang sedang di PTUN Serang Banten.

Diterbitkan oleh Instagram · 1 April · Serang ·

...

**PENGUMUMAN**

Jam Kerja dan Pelayanan selama bulan Ramadhan 1443 H pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



Gambar: Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta

### 3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Link Tautan
<b>1. Informasi Tentang Profil Pengadilan</b>	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala">https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala</a>
Sejarah Pengadilan	
Profil Ketua	

	Profil Pegawai
	Struktur Organisasi
	Statistik Pengadilan
	Wilayah Yurisdiksi
	Visi dan misi
	Tugas pokok dan fungsi
	Kegiatan pengadilan
	Survey Pelayanan Publik
<b>2. Pelayanan dasar Pengadilan</b>	
	Standar pelayanan Pengadilan
	SOP Penerimaan Gugatan
	Alur Pemeriksaan Persiapan
	Biaya perkara
	Jam kerja pelayanan publik
	Tata tertib persidangan
	Jadwal persidangan
<b>3. Informasi Terkait Hak Masyarakat</b>	
	Prosedur pemberian layanan hukum
	Prodeo
	Laporan pelaksanaan Prodeo
	Posbakum
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum
	Prosedur Permohonan informasi
	Prosedur Keberatan informasi
	Formulir Permohonan informasi
	Formulir keberatan informasi
	Tim pelaksana penanganan informasi
	Pedoman Pengaduan
	Prosedur Pengaduan
	Hak Pelapor dan Terlapor
	Formulir Pengaduan

<b>4. Sistem Informasi Perkara</b>	
	Penelusuran perkara
	Direktori putusan
	Statistik perkara
<b>5. Pengumuman</b>	
	Lelang barang dan jasa secara elektronik
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah
	Pengumuman lelang
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa
<b>6. Laporan Kinerja Pengadilan</b>	
	SAKIP
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
	CALK
	PKT
	RKT
	IKU
	RAK
<b>7. Laporan Perkara</b>	
	Laporan jenis perkara
	Laporan keadaan perkara
	Laporan keuangan perkara
<b>8. Transparansi keuangan</b>	
	Laporan Anggaran DIPA
	Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan PNBPN
	Statistik Keuangan
<b>9. Transparansi aset</b>	
	Laporan BMN
	Sarana dan prasarana
<b>10. Transparansi kepegawaian</b>	
	Persyaratan usul menjadi PNS

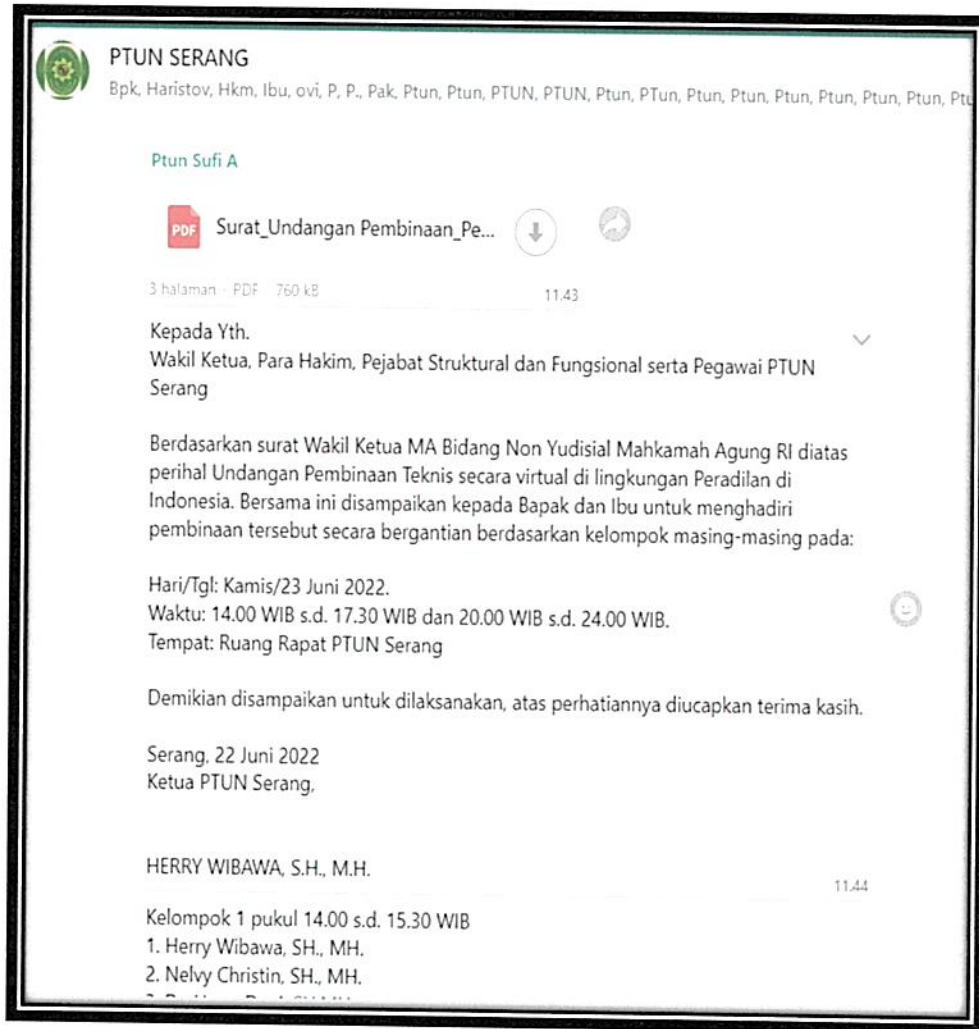
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	
	Persyaratan pengajuan ASKES	
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	
	Persyaratan pengajuan pensiun	
	Hukuman disiplin	
<b>11</b>	<b>LHKPN/LHKASN</b>	
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan II ini mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya seremoni yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik.

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

- a) Publikasi kegiatan pada Website
- b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial (*Instagram dan Facebook*)
- c) Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa Whatsapp. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.



Gambar: Publikasi harian melalui media *Whatsapp*

#### 4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

### BAB III

## EVALUASI PELAYANAN

## INFORMASI PUBLIK

#### A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh menggambarkan semakin baiknya pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu Semester I Tahun 2022.

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	2	Facebook	1	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	6-10 hari
2	Feb	1	Facebook	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas	-
3	Mar	1	e-Mail	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	-
4	Apr	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1-2 hari
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Jun	1	Langsung (tatap muka)	1	-	-	-	1-2 hari
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	-	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

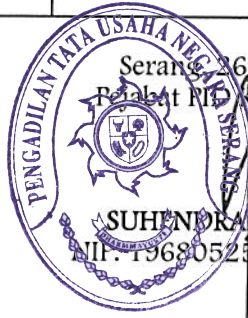
**Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan**

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan				
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)
1	Jan	1	-	-	1	-	-
2	Feb	-	-	-	-	-	-
3	Mar	-	-	-	-	-	-
4	Apr	1	1	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Jun	1	1	-	-	-	-

**LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK (https://ptun-serang.go.id.)**

Triwulan ke: II (Dua) Tahun 2022

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	V		V		30-06-2022	<i>Link SIPP Update sesuai waktu server pusat</i>
- Buku Register Perkara - Tahapan Penanganan Perkara	V V		V V		30-06-2022 30-06-2022	<i>Link SIPP Link SIPP</i>
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai - Statistik penjatuhan hukuman disiplin - Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman	V V		V V		10-05-2022 10-05-2022	<i>Dok. Laporan Per Jan-Mei Tahun 2022</i>
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim	V		V		30-06-2022	<i>Laporan telah diupload</i>
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua - Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung - Hasil Penelitian yang dilakukan	V V			V -		<i>Link JDIH Link JDIH Tidak ada penelitian</i>
4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	V V			V V		<i>SOP pada Website Menu Tentang Pengadilan, Sub Menu Kepaniteraan  Link PPID</i>
- Profil Hakim dan Pegawai	V		V		20-05-2022	<i>Terdapat penambahan 2 orang pegawai (CPNS)</i>
- Data Statistik Kepegawaian	V		V		20-05-2022	<i>Update penambahan personil</i>

Serang, 26 Juli 2022  
 Pejabat RI/Kepaniteraan  
  
 SUHENDRA S.H., M.H.  
 NIP. 196805251992031006

**LEMBAR MONITORING LAYANAN INFORMASI PUBLIK (<https://ptun-serang.go.id>)**

Triwulan ke: II (Dua) Tahun 2022

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
<b>1. Informasi Tentang Profil Pengadilan</b>						
Sejarah Pengadilan	V			V		<i>Tetap</i>
Profil Ketua	V			V		<i>Tetap</i>
Profil Pegawai	V		V		20-05-2022	<i>Update penambahan pegawai</i>
Struktur Organisasi	V		V		30-06-2022	<i>Update Pengurangan 1 orang Hakim</i>
Statistik Pengadilan		V	V			<i>Link SIPP pembaharuan disesuaikan dengan waktu server</i>
Wilayah Yurisdiksi	V		V			<i>Tetap</i>
Visi dan misi	V		V			<i>Tetap</i>
Tugas pokok dan fungsi	V		V			<i>Tetap</i>
Kegiatan pengadilan	V		V		27-06-2022	<i>Kegiatan Rapat Koordinasi dan Tinjauan Manajemen FKAP</i>
Survey Pelayanan Publik	V			V		<i>s.d. Juni 2022 masih proses pengumpulan data Survey IKM</i>
<b>2. Pelayanan dasar Pengadilan</b>						
Standar pelayanan Pengadilan	V					<i>Tetap</i>
SOP Penerimaan Gugatan	V					<i>Tetap</i>
Alur Pemeriksaan Persiapan	V					<i>Tetap</i>
Biaya perkara	V					<i>Tetap</i>
Jam kerja pelayanan publik	V					<i>Tetap</i>
Tata tertib persidangan	V					<i>Tetap</i>
Jadwal persidangan	V			V		<i>Update sesuai waktu server</i>
<b>3. Informasi Terkait Hak Masyarakat</b>						
Prosedur pemberian layanan hukum	V			V		<i>Tetap</i>
Prodeo	V		V		18-04-2022	<i>Update Akun dan Satuan Harga</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala		Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
		Ada	Tidak	Ada	Tidak		
	Posbakum	V			V		<i>Tetap</i>
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum	V		V		30-06-2022	<i>Update Laporan realisasi anggaran Posbakum bulan Juni 2022</i>
	Prosedur Permohonan informasi	V			V		<i>Tetap</i>
	Prosedur Keberatan informasi	V			V		<i>Tetap</i>
	Formulir Permohonan informasi	V			V		<i>Tetap</i>
	Formulir keberatan informasi	V			V		<i>Tetap</i>
	Tim pelaksana penanganan informasi	V		V		14-04-2022	<i>update SK JDIH</i>
	Pedoman Pengaduan	V			V		<i>Tetap</i>
	Prosedur Pengaduan	V			V		<i>Tetap</i>
	Hak Pelapor dan Terlapor	V			V		<i>Tetap</i>
	Formulir Pengaduan	V			V		<i>Tetap</i>
<b>4. Sistem Informasi Perkara</b>							
	Penelusuran perkara	V		V		30-06-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
	Direktori putusan	V		V		30-06-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
	Statistik perkara	V		V		30-06-2022	<i>Update sesuai waktu Server pusat</i>
<b>5. Pengumuman</b>							
	Lelang barang dan jasa secara elektronik	V			V		<i>Link LPSE Mahkamah Agung RI</i>
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah	V			V		<i>Tetap</i>
	Pengumuman lelang	V		V		10-05-2022	<i>Update pengumuman pengadaan</i>
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa		V				<i>Tidak ada informasi RUP Barang dan Jasa namun terdapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)</i>
<b>6. Laporan Kinerja Pengadilan</b>							
	LKjIP	V			V		<i>LKjIP Tahun 2021 telah diupload</i>
	Laporan Tahunan	V		V		14-04-2022	<i>Update Laptah 2021</i>
	CALK	V		V		14-04-2022	<i>Udpate Calk 2021</i>
	PKT	V			V		<i>PKT Tahun 2021 telah diupload</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala		Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
		Ada	Tidak	Ada	Tidak		
	RKT	V			V		<i>RKT Tahun 2021 telah diupload</i>
	IKU	V			V		<i>IKU Tahun 2021 telah diupload</i>
	RAK	V			V		<i>RAK Tahun 2021 telah diupload</i>
<b>7. Laporan Perkara</b>							
	Laporan jenis perkara		V	V		18-04-2022	<i>Terdapat pada lapbul Kepaniteraan dan Kesekretariatan</i>
	Laporan keadaan perkara		V	V		18-04-2022	<i>Terdapat pada lapbul Kepaniteraan dan Kesekretariatan</i>
	Laporan 4 bulanan		V		V		<i>Terdapat pada lapbul Kepaniteraan dan Kesekretariatan</i>
	Laporan 6 bulanan		V		V		<i>Terdapat pada lapbul Kepaniteraan dan Kesekretariatan</i>
	Laporan tahunan		V	V		14-04-2022	<i>Terdapat pada laporan pelaksanaan kegiatan tahunan</i>
	Laporan keuangan perkara		V	V		18-04-2022	<i>Terdapat pada lapbul Kepaniteraan dan Kesekretariatan</i>
<b>8. Tranparansi keuangan</b>							
	Laporan Anggaran DIPA	V			V		<i>Perlu diupdate jika ada Revisi DIPA</i>
	Laporan Realisasi Anggaran	V		V		30-06-2022	<i>LRA bulan Juni 2022</i>
	Laporan PNPB	V			V		<i>Laporan PNPB terakhir periode bulan April 2022</i>
	Statistik Keuangan	V			V		<i>Telah ditambahkan fitur laporan Statistik Keuangan per triwulanan</i>
<b>9. Transparansi aset</b>							
	Laporan BMN	V	V		V	10-05-2022	<i>Laporan BMN tahun 2021 telah diupload</i>
	Sarana dan prasarana	V	V	V		10-05-2022	<i>Update Laporan KPB Smt II Tahun 2021</i>
<b>10 Transparansi kepegawaian</b>							
	Persyaratan usul menjadi PNS	V			V		<i>Tetap</i>
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	V			V		<i>Tetap</i>
	Persyaratan pengajuan ASKES/BPJS	V			V		<i>Tetap</i>

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala		Informasi Tersedia		Pembaharuan Informasi		Tgl Pembaharuan	Catatan Hasil Monitoring
		Ada	Tidak	Ada	Tidak		
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	V			V		Tetap
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	V			V		Tetap
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	V			V		Tetap
	Persyaratan pengajuan pensiun	V			V		Tetap
	Hukuman disiplin	V		V		10-05-2022	Update Dok. Laporan Per Jan-Mei Tahun 2022
<b>11</b>	<b>LHKPN/LHKASN</b>						
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	V			V		LHKPN/LHKASN Tahun 2021 telah diupload


 Serang, 26 Juli 2022  
 Pejabat P/D Kesekretariatan  
**NURHASANAH, S.H.**  
 NRP. 196703081987032001

## **B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID**

Berdasarkan hasil monitoring bahwa temuan-temuan pemenuhan informasi publik yang ditemui pada periode Triwulan ke-1 telah ditindaklanjuti dan terhadap hasil monitoring kegiatan layanan informasi publik periode Triwulan ke-2 ditemui hal-hal adalah sebagai berikut:

1. Terdapat waktu pemenuhan informasi publik yang menggunakan media sosial untuk permintaan informasi publik terlayani 6-10 hari sehingga masuk pada kategori Cukup.
2. Pada informasi yang disediakan dan diumumkan Berkala
  - Informasi laporan jenis Perkara, informasi keadaan Perkara, informasi laporan 4 bulanan, informasi laporan 6 bulanan laporan keuangan Perkara terdapat dalam laporan bulanan reguler Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
  - Informasi laporan tahunan terdapat pada laporan pelaksanaan kegiatan tahunan.
  - Laporan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum update sampai dengan bulan pelaporan periode triwulan II.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan informasi publik, untuk itu langkah-langkah evaluasi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap waktu pemenuhan informasi publik yang menggunakan media sosial terdapat permintaan informasi publik terlayani 6-10 hari sehingga masuk pada kategori Cukup, namun kategori tersebut perlu diminimalisir dengan cara Admin pengelola akun media sosial PPID Satker perlu diingatkan untuk lebih sering dalam pemeriksaan berkala akun media sosial PPID Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga permintaan informasi publik dapat segera diketahui dan segera ditindaklanjuti.
2. Kepada stakeholder yang berkaitan dengan laporan hasil monitoring PPID yang ditemukan agar ditindaklanjuti dengan mengisi/melengkapi/memperbaharui data-data layanan informasi publik.

3. Jangka waktu penyelesaian Layanan informasi publik yang belum lengkap/terisi/diperbaharui adalah s.d. awal triwulan ke-III (bulan Juli 2022), sehingga pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Triwulan ke-III tidak lagi ditemui.

## BAB IV

### PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan II tahun 2022 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

# **LAMPIRAN**

## NOTA DINAS

Kepada : Panitera Muda Hukum  
Dari : Kepala Sub Bagian PTIP  
Nomor : W2-TUN7/341/Subbag/PTIP/VII/2022  
Tanggal : 25 Juli 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permintaan data pelayanan informasi publik periode Semester I Tahun 2022 untuk keperluan Monev PPID.

---

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk keperluan pengisian data Monitoring dan Evaluasi oleh Pejabat Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka dengan ini disampaikan permintaan data pelayanan informasi publik yang diterima secara langsung (tatap muka) untuk periode Semester I Tahun 2022 dengan formulir isian terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

---

Kasubbag Perencanaan, TI dan  
Pelaporan,



MASURI, S.E.  
NIP. 198008082009121002

FORM ISIAN

Rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu Semester I Tahun 2022.

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	Nihil						
2	Feb	Nihil						
3	Mar	Nihil						
4	Apr	1 I	melihat langsung	✓				1-2 Hari
5	Mei	Nihil						
6	Jun	1	Mendengarkan	✓				1-2 Hari
<b>Jumlah</b>		2						

Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.

## NOTA DINAS

Kepada : Administrator sarana informasi publik secara elektronik  
Dari : Kepala Sub Bagian PTIP  
Nomor : W2-TUN7/342/Subbag/PTIP/VII/2022  
Tanggal : 25 Juli 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permintaan data pelayanan informasi publik periode Semester I Tahun 2022 untuk keperluan Monev PPID.

---

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk keperluan pengisian data Monitoring dan Evaluasi oleh Pejabat Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka dengan ini disampaikan permintaan data pelayanan informasi publik yang diterima melalui sarana elektronik (email, media sosial, website dan lainnya) untuk periode Semester I Tahun 2022 dengan formulir isian terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

---

Kasubbag Perencanaan, TI dan  
Pelaporan,



MASURI, S.E.  
NIP. 198008082009121002

## FORM ISIAN

**Rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID melalui sarana elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu Semester I Tahun 2022.**

No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Jan	2	Facebook	1	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	6-10 hari
2	Feb	1	Facebook	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas.	-
3	Mar	1	e - Mail	-	-	1	Permohonan IP yang diminta kurang jelas (diarahkan untuk datang langsung)	-
4	Apr							
5	Mei							
6	Jun							
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Admin Sarana Informasi Publik Elektronik  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



LUQMAN NUL HAQIM, S.Kom.